



Buletin Parlementaria

Nomor 1135/1/II/2021 • Februari 2021



BKSAP DPR Buka Jalan Potensi Kerja Sama Daerah Dengan Negara Lain



4 Pemerintah Harus Perhatikan Korban Bencana di Berbagai Daerah



13 Vaksin Merah Putih Diproduksi 2022



9 772614 339005



BULETIN

BKSAP DPR Buka Jalan Potensi Kerja Sama Daerah Dengan Negara Lain

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja sebagai bagian dari program penjangkauan publik (*public outreach*). Acara tersebut digelar dengan berdialog dan berdiskusi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Garut, civitas akademika Universitas Garut dan Institut Pendidikan Indonesia beserta perwakilan mahasiswa, dengan mengusung tema “Diplomasi Parlemen Sebagai Diplomasi Total Indonesia”, di Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (21/1).

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengatakan, sebagai salah satu alat kelengkapan dewan (AKD), BKSAP memiliki keinginan untuk menangkap aspirasi dan pandangan publik dalam pelaksanaan diplomasi parlemen sekaligus memperluas informasi mengenai peran diplomasi parlemen yang dilakukan DPR RI. Selain menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, Dewan juga menjalankan tugas diplomasi parlemen dengan negara lain.

“Dalam rangka kunjungan kerja BKSAP DPR RI, kami datang bersama untuk menjelaskan apa tugas-tugas diplomasi parlemen dan tentu ini bagian dari yang menyatu dengan tugas DPR. Harapannya dengan kunjungan ke daerah seperti ini, bisa membawakan aspirasi dan menjembatani aspirasi daerah dengan pihak-pihak lain di luar negeri,” kata Fadli Zon dalam keterangan pers kepada awak media, usai pertemuan.

Meski di tengah pandemi, Fadli Zon



Pertemuan Tim Kunjungan Kerja BKSAP dipimpin Ketua BKSAP Fadli Zon dengan Bupati Garut. Foto: Alfijik

menyatakan hal itu tidak menyurutkan tugas diplomasi untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara lain. Apalagi saat ini, Indonesia tengah menjalankan diplomasi vaksin sebagai upaya bersama penanggulangan sebaran virus Covid-19. “Saling bertukar pengalaman dengan negara-negara lain tetap dilakukan, dengan Korea, New Zealand, Vietnam, Australia, kita tetap mendukung diplomasi vaksin dan diplomasi menghadapi pandemi,” tambah politisi Partai Gerindra itu.

Secara khusus dalam kunjungan tersebut, pihaknya juga membahas potensi kerja sama yang bisa dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi di Garut dengan perguruan lainnya di luar negeri. “Ada beberapa perguruan tinggi (di Garut), yang mungkin bisa kita fasilitasi dan kita jembatani dengan perguruan-perguruan lain di luar

negeri. Termasuk juga menjembatani dengan Anggota DPR yang hadir dari Komisi X dengan bidang pendidikan, Komisi VII juga Komisi I, untuk tahu perkembangan informasi terakhir,” lanjut legislator dapil Jabar V itu.

Pada kesempatan tersebut, Anggota BKSAP yang juga Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menjelaskan terkait ditundanya pengangkatan pegawai dan guru honorer menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/P3K) karena adanya pandemi Covid-19.

Ia menambahkan, Komisi X DPR RI telah membahas dengan empat kementerian terkait ini, dan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan PKH 2 dan guru honorer harapannya selesai tahun 2021 ini dari yang seharusnya selesai tahun kemarin, Komisi X telah beri batas waktu sampai Maret,” ungkapnya. ■ alw/sf



Puan Maharani Minta Kapolri Listyo Sigit Tingkatkan Layanan dan Responsif pada Aduan Masyarakat



Pimpinan DPR RI bersama calon Kapolri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo pada Rapat Paripurna. Foto: Gerald/Jk

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyambut baik visi dan misi Komjen Pol.

Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) di Komisi III DPR RI beberapa waktu yang lalu. Menurut Puan, calon tunggal Kapolri itu memiliki semangat transformasi membawa Polri menjadi lebih baik.

Puan menuturkan, untuk mewujudkan Polri yang “presisi”, atau abreviasi dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, maka Listyo harus melakukan perubahan besar dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.

“Kita sudah mendengarkan visi misi calon Kapolri saat uji kelayakan. Ada semangat transformasi di tubuh Polri,” ungkap Puan usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1). Menurutnya ada tiga pekerjaan rumah Listyo Sigit saat resmi menjadi Kapolri nantinya.

Tiga pekerjaan rumah itu adalah

terkait penegakan hukum, pelayanan publik, dan reformasi internal.

“Penegakan hukum agar ada keadilan restoratif. Penegakan hukum tidak memakai kaca mata kuda, tapi melihat konteks masalah dan memperhatikan aspek-aspek sosial kemasyarakatan,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

“Pelayanan publik harus ditingkatkan. Fungsi polisi melayani masyarakat, di sini penting penggunaan teknologi mengingat keterbatasan personel. Intinya polisi harus responsif terhadap pengaduan masyarakat,” sambung wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut.

Lalu mengenai reformasi internal, menurut Puan, peningkatan kualitas SDM dapat difokuskan pada sikap dan mental anggota Polri agar senantiasa bekerja secara profesional. Setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPR, Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, disetujui menjadi Kapolri. Keputusan itu, ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (21/1). ■ [ann/sf](#)



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiarti, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Arranda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S. Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natallo, Aisyah Salma, Dewa Pratama

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna,

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Pemerintah Harus Perhatikan Korban Bencana di Berbagai Daerah

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, TNI dan Polri untuk memperhatikan seluruh wilayah di Indonesia yang tertimpa bencana sebagai dampak dari cuaca ekstrem. Azis mengingatkan agar jangan sampai hanya fokus di satu wilayah saja, sementara daerah lain tidak ter-cover.

Beberapa bencana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia di antaranya gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat, tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat, banjir di Kalimantan Selatan, dan lainnya. “Jangan sampai pemerintah hanya fokus satu titik daerah saja di Majene, namun daerah lain yang mengalami musibah akibat cuaca ekstrem dan memerlukan bantuan tidak ter-cover seperti di Sumedang, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan

Wakil Ketua DPR RI
M. Azis Syamsuddin.
Foto: Mario/jk

”

MEREKA MEMBUTUHKAN MAKANAN, PAKAIAN, DAN OBAT-OBATAN UNTUK KEBUTUHAN KESEHARIAN KARENA EKONOMI LUMPUH.

daerah lainnya,” kata Azis dalam siaran persnya, Sabtu (16/1).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan masih banyak aspirasi masyarakat yang mengeluh tidak mendapatkan bantuan. Bahkan, masyarakat sampai harus meminta untuk kebutuhan pokok makan. Ia menjelaskan hal itu seperti yang terjadi pada musibah banjir di Kabupaten Banjar dan Tanah Laut, Kalimantan Selatan. “Pemberian bantuan harus merata dari hulu ke hilir,” tegas Azis.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu mengingatkan, warga yang menjadi korban bencana tersebut membutuhkan berbagai bantuan dari pemerintah. Pasalnya, perekonomian di wilayah yang menjadi bencana menjadi lumpuh.

“Mereka membutuhkan makanan, pakaian, dan obat-obatan untuk kebutuhan keseharian karena ekonomi lumpuh. Jangan sampai karena kendala keterbatasan alat dan akses petugas tidak memberikan bantuan,” tandas Azis. ■ es

DPR Minta Menkes Buat Instrumen Penanganan Covid-19 yang Efektif

Pemerintah kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sebagian Jawa dan Bali. Kebijakan itu diambil lantaran pemerintah melihat kasus Covid-19 tak kunjung mereda. Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membuat instrumen perencanaan penanganan masalah Corona.

“Kami minta kepada Menkes untuk kemudian mengalkulasi lagi dan kemudian melakukan kontingensi *plan* untuk mengatasi masalah ini,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1).

Salah satu yang menjadi perhatian Dasco adalah fasilitas kesehatan yang hampir penuh oleh pasien Covid-19. “Kita memonitor rumah sakit di Jakarta, isinya tidak hanya penduduk Jakarta tapi ada dari provinsi lain seperti Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi yang juga dirawat di rumah sakit di Jakarta,” ungkap Dasco,

Politisi Partai Gerindra itu menuturkan kenaikan kasus Covid-19 ini sulit dihindari. Untuk itu, ia meminta pemerintah membuat kebijakan penangan yang paling efektif. “Liburan kemarin menyebabkan klaster-klaster yang tidak bisa dihindari. Nah, antara PPKM, PSBB dan lain-lain, kita minta kepada pemerintah mengkaji apa yang paling efektif untuk diterapkan,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu.

Dasco pun mengajak masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menangani penularan Covid-19 dengan

”

LIBURAN KEMARIN MENYEBABKAN KLASTER-KLASTER YANG TIDAK BISA DIHINDARI. NAH, ANTARA PPKM, PSBB DAN LAIN-LAIN, KITA MINTA KEPADA PEMERINTAH MENGAJAI APA YANG PALING EFEKTIF UNTUK DITERAPKAN

menaati protokol kesehatan dan membatasi aktivitas di luar rumah.”Kita semua harus ikut bersama-sama membantu Menkes. Kami imbau masyarakat untuk tetap menjaga proses dan kemudian tidak melakukan aktivitas jika tidak perlu,” tutup dia. ■

rmm/es

Wakil Ketua DPR RI
Sufmi Dasco Ahmad
Foto: Runi/jk





Anggota Komisi I DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah. Foto: Jaka/jk

Pemerintah Harus Pastikan Diaspora Indonesia Mendapat Akses Vaksinasi

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah meminta Kementerian Luar Negeri dapat proaktif memastikan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri (diaspora) bisa mendapatkan akses untuk vaksinasi Covid-19. Sebab diketahui dari tiga juta diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia, 90 persennya terdiri dari tenaga kerja dan pelajar yang aktif melakukan kegiatannya.

Hal tersebut disampaikan Rizki dalam Rapat Kerja antara Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi beserta jajarannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (26/1). Menurutnya dengan diterbitkannya

aturan *international health regulation* yang mengatakan bahwa vaksinasi suatu daerah merupakan kebijakan dari daerah, diaspora Indonesia harus dipastikan mendapat vaksin tersebut.

“Jadi yang menjadi *concern* saya adalah apakah tiga juta dari mengacu kepada data Kementerian Luar Negeri, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dimana 90 persen daripada mereka adalah tenaga kerja Indonesia dan juga pelajar akan mendapat akses yang sama terhadap vaksinasi tersebut. Saya kira menjadi tugas Kemlu memastikannya,” tutur Rizki.

Politisi Partai Demokrat tersebut mengatakan diplomasi *maintenance* aktif dari Kemlu akan memberikan rasa lega bagi para

diaspora tersebut. Untuk itu Rizki berharap kepastian mendapatkan vaksin bagi WNI di luar negeri harus juga dimasukkan ke dalam *roadmap* pemerintah terhadap vaksinasi. Sebab ini merupakan satu bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya.

“Apa saja upaya yang telah dilakukan dari Kemlu untuk memastikan warga negara kita di luar sana bisa mendapatkan akses kepada vaksinasi? Tentu ini menjadi tantangan untuk Pak Direktur Perlindungan WNI, Pak Yudha. Saya tahu beliau ini sangat pro aktif. Ini dimaksudkan untuk memberikan rasa lega kepada warga negara Indonesia terutama para TKI dan pelajar,” tandas legislator dapil Banten I itu. ■ *er/sf*

KKP Harus Benahi Birokrasi Internal

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar melakukan reformasi birokrasi tahun 2021. Menurutnya, dengan kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, seharusnya KKP lebih fokus membenahi infrastruktur internal birokrasi terlebih dahulu, termasuk perihal administratifnya.

“Coba perhatikan apa sih yang menjadi akar permasalahan di KKP sehingga menyebabkan realisasi anggaran tahun 2020 tidak sesuai target?” tegas Dedi di sela-sela Rapat Dengar Pendapat mengenai Progres dan Evaluasi Bantuan Pemerintah Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sekaligus Pelatihan dan Penyuluhan Masyarakat Tahun 2020 dengan jajaran KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1).

Politisi Partai Golkar itu menyoroti

soal Bantuan Bibit Rumput sebagai permasalahan program kerja KKP. Berdasarkan paparan Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M. Zaini dari 200.000 kg bantuan bibit rumput laut yang ditargetkan, sekitar 83.51 persen yang terealisasi. Akan tetapi Dedi menyatakan program ini tidak berjalan, bahkan hilang.

“Covid-19 dan perubahan cuaca tidak bisa dijadikan alasan tidak berjalannya program kerja. Cara berpikir KKP dalam membuat program kerja belum komprehensif. Menurut saya, sudah tidak layak kementerian membuat pengadaan skala kecil, perlu dihilangkan. Lebih baik fokus pada sedikit program yang berdampak besar. Lalu perbaiki pengawasan dan pembenahan internal KKP,” tanggap mantan Bupati Purwakarta itu.

Sepanjang tahun 2020, program kerja KKP seperti Bantuan Bibit Rumput Laut, Bioflok,

”

COVID-19 DAN PERUBAHAN CUACA TIDAK BISA DIJADIKAN ALASAN TIDAK BERJALANNYA PROGRAM KERJA. CARA BERPIKIR KKP DALAM MEMBUAT PROGRAM KERJA BELUM KOMPREHENSIF. MENURUT SAYA, SUDAH TIDAK LAYAK KEMENTERIAN MEMBUAT PENGADAAN SKALA KECIL, PERLU DIHILANGKAN. LEBIH BAIK FOKUS PADA SEDIKIT PROGRAM YANG BERDAMPAK BESAR. LALU PERBAIKI PENGAWASAN DAN PEMBENAHAN INTERNAL KKP,

Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP), dan Budidaya Manggot tidak berjalan sesuai yang dipaparkan Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini. Sebagian besar Anggota Komisi VI menolak paparan tersebut. “Kejadian di tahun lalu cukup jadi pembelajaran. Kami tegaskan sekali kembali, jangan sampai terulang lagi,” pungkas Dedi.

■ ts/sf



Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi.
Foto: eno/jk

Komisi V Ingatkan Program Ditjen Cipta Karya Harus Sesuai Usulan DPR

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengingatkan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar program-program institusi tersebut ke depannya sesuai dengan usulan dan aspirasi Komisi V DPR RI. Sebab, Novita kerap menemui program yang justru bukan hasil aspirasi dan sebaliknya program yang menjadi usulan dari wakil rakyat justru belum direalisasikan Ditjen Cipta Karya hingga kini.

Novita menegaskan hal itu saat menyampaikan usulan dalam RDP Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dengan Dirjen Cipta Karya PUPR Diana Kusumastuti dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Suchayono, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1).

“Program Ditjen Cipta Karya ke depannya sampai tingkat jajaran paling bawah dengan sadar harus sesuai dengan usulan dari Komisi V DPR RI. Contohnya di dapil, apa yang tidak saya usulkan justru saya dapat laporan ada wujud programnya. Tetapi, apa yang saya usulkan seperti SANIMAS dan SANDES malah tidak keluar wujud program tersebut. Itu membuat malu. Padahal, pembahasannya dengan Komisi V,” tandasnya.

Maka, politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut mendesak berbagai program yang diusulkan seperti program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan Sanitasi Perdesaan Padat Karya (SANDES) khususnya di wilayah Cilacap dan Banyumas

”

PROGRAM DITJEN CIPTA KARYA KE DEPANNYA SAMPAI TINGKAT JAJARAN PALING BAWAH DENGAN SADAR HARUS SESUAI DENGAN USULAN DARI KOMISI V DPR RI. CONTOHNYA DI DAPIL, APA YANG TIDAK SAYA USULKAN JUSTRU SAYA DAPAT LAPORAN ADA WUJUD PROGRAMNYA. TETAPI, APA YANG SAYA USULKAN SEPERTI SANIMAS DAN SANDES MALAH TIDAK KELUAR WUJUD PROGRAM TERSEBUT.

untuk segera dapat terealisasi dalam waktu dekat. Mengingat, tuturnya, di sebagian wilayah diketahui sudah ada program SANDES yang terealisasi dengan baik.

“Untuk itu, mohon ke depannya kalau ada usulan dari Anggota Komisi V yang belum bisa direalisasikan agar bisa direvisi sehingga bisa terealisasi. Tujuannya, agar ke depannya Komisi V DPR RI dengan Ditjen Cipta Karya bisa bermitra lebih baik bagi dan secara umum komunikasi kita lebih lancar dari tingkat jajaran paling bawah sampai pusat,” pungkas legislator dapil Banyumas-Cilacap itu. ■ pun/sof



Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti Foto: Arief/jk

Realisasi Transaksi Kartu Tani Banten Masih Rendah

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mendapati informasi bahwa realisasi transaksi menggunakan Kartu Tani di Provinsi Banten masih rendah. Martin menilai, transaksi menggunakan kartu yang dikeluarkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian bekerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk perlu dimaksimalkan.

“Program Kartu Tani belum secara maksimal dimanfaatkan. Tingkat penyerapannya saja di Provinsi Banten bahkan di bawah satu persen, yang menjadikan Banten, provinsi terendah dalam hal realisasi transaksi kartu tani. Saya rasa ini jadi (perlu) perhatian khusus,” kata Martin usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan jajaran direksi BRI di Banten, Senin (25/1).

Politisi Partai NasDem itu melanjutkan, minimnya pemanfaatan Kartu Tani ini bukan hanya di Banten, namun daerah lain yang memiliki kawasan pertanian. “Jadi berdasarkan temuan, saya meminta kepada BRI, (terkait) data (transaksi Karu Tani) lebih dalam lagi, dan sudah dikatakan pihak BRI akan memberikan data yang diinginkan, untuk nantinya Komisi VI akan mengevaluasi kepada pihak-pihak terkait,” paparnya.

Sebagai tindak lanjut terkait hal ini, Komisi VI DPR RI juga akan menggelar rapat kerja gabungan dengan Komisi IV DPR RI, selaku mitra kerja Kementan. “Rapat gabungan ini sangat diperlukan, agar program ini lebih bermanfaat bagi rakyat. Karena ini sebenarnya tidak terkait dengan pandemi Covid-19, Kartu Tani sangat diperlukan masyarakat. Jadi kita tahu dimana dan apa

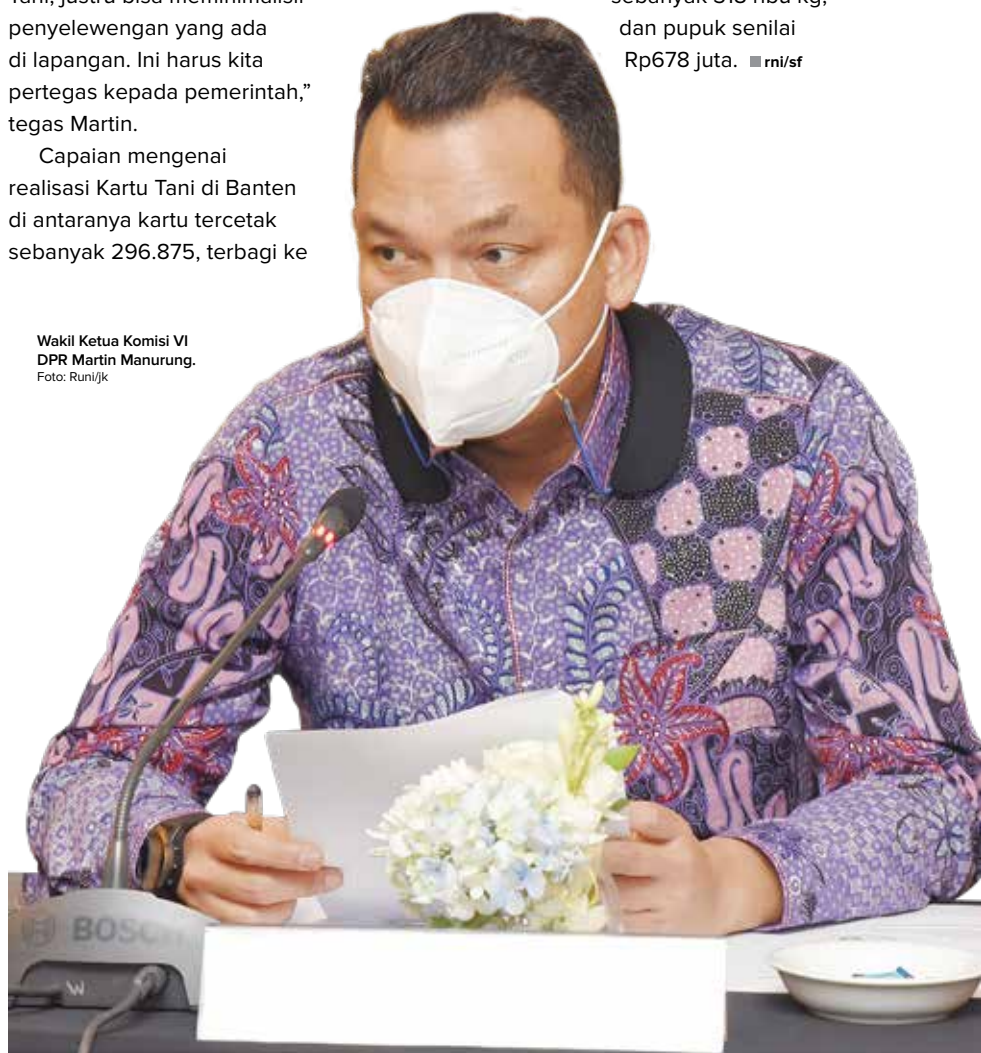
penyebab dari persoalan yang ada,” pungkas Martin.

Legislator dapil Sumatera Utara II itu menilai, penyebab minimnya transaksi Kartu Tani ini apakah karena minimnya sosialisasinya atau penggunaan kartu yang belum jamak (dikenal) di tengah masyarakat sebagai satu satunya cara untuk memperoleh subsidi. “Bahkan menurut saya dengan adanya Kartu Tani, justru bisa meminimalisir penyelewengan yang ada di lapangan. Ini harus kita pertegas kepada pemerintah,” tegas Martin.

Capaian mengenai realisasi Kartu Tani di Banten di antaranya kartu tercetak sebanyak 296.875, terbagi ke

petani sebanyak 217.318 (73 persen), sudah digunakan 1.459 kartu (0,7 persen), jumlah kpl 446, dan EDC terpasang 314 (70 persen). Sementara jumlah transaksi mencapai 2796 kali dengan realisasi 381.289 kg, dan nilai nominal Rp678 juta. Selama tahun 2020, enam kabupaten dan kota di Banten telah melakukan pembelian pupuk subsidi menggunakan Kartu

Tani dengan total realisasi sebanyak 318 ribu kg, dan pupuk senilai Rp678 juta. ■ rni/sf



Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung.
Foto: Runi/jk

Ketersediaan Pangan di Gudang Bulog Cikande Masih Mencukupi

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya

Linggih meninjau Gudang Bulog Modern (GBM) Cikande di Serang, Provinsi Banten guna melihat langsung kinerja Perum Bulog dan memastikan ketersediaan pangan untuk *survive* ke depan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Kita melihat secara langsung, tidak ada kendala dalam ketersediaan pangan, masih mencukupi, di mana kita tahu bahwa semua negara saat ini berusaha mempertahankan ketahanan pangannya. Tidak saja kami menemukan berita di kantor saja, tapi kali ini kami melihat kenyataannya Gudang Bulog masih penuh dengan ketersediaan beras,” ucapnya di sela-sela memimpin Tim Kunspek Komisi VI DPR RI meninjau GBM Cikande di Serang, Banten. Senin (25/1).

Ditambahkan Demer, sapaan akrabnya, saat ini kinerja Bulog sudah membaik, salah satunya terkait aspek utang yang sebelumnya di kisaran Rp30 triliun, saat ini hanya tinggal Rp13 triliun. Namun Bulog masih memerlukan dorongan atau kebijakan-kebijakan untuk ke depannya dalam rangka ketahanan pangan di masa depan.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, kendala yang dihadapi oleh Bulog yaitu saat ini banyaknya swasta yang bergerak untuk memberatkan Bulog, karena Bulog harus menyetok barangnya dan itu



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. Foto: Azka/jk

”

KITA MELIHAT SECARA LANGSUNG, TIDAK ADA KENDALA DALAM KETERSEDIAAN PANGAN, MASIH MENCUKUPI, DI MANA KITA TAHU BAHWA SEMUA NEGARA SAAT INI BERUSAHA MEMPERTAHAKAN KETAHANAN PANGANNYA.

menggunakan dana komersial dari bank untuk memenuhi *safety net* di Indonesia, dimana mereka dikenakan bunga komersial yang disamakan dengan pengusaha/ perusahaan swasta.

“Ini ke depan akan kami perbaiki, berusaha untuk memberikan kemudahan kepada Bulog, sehingga menjadi berimbang antara penugasan kepada Bulog dan juga bantuan terhadap pemerintah berimbang. Sehingga mereka benar-benar bisa *survive* ke depannya dalam rangka ketahanan pangan,” ungkap legislator dapil Bali itu. ■ azk/sf

PT Pupuk Indonesia Harus Awasi Kartu Tani di Lapangan

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menekankan kepada PT Pupuk Indonesia agar betul-betul memperhatikan infrastruktur, peralatan atau sarana dan prasarana pendukung Kartu Tani di masing-masing kios penyalur pupuk. Ia berpandangan, Kartu Tani bisa menjadi solusi kelangkaan pupuk yang seringkali dihadapi para petani.

Hal ini dikatakan Aria usai pertemuan tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Nugraha Christijanto di Gudang Sumur Pecung PT Pupuk Indonesia, Serang, Banten, Selasa (26/1).

“Apabila memang situasi dan kondisi kios itu belum memenuhi syarat untuk adanya alat geseknya (Electronic Data Capture/EDC), maka kebijakan ini juga tidak serta merta konservatif, kebijakan akan lentur juga buat kios-kios yang memang belum bisa melaksanakan,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Di samping itu, politisi dapil Jawa Tengah V ini menilai ada kendala yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan Kartu Tani. Dimana, di beberapa daerah ada petani yang keberatan dengan sistem deposit di Bank BRI untuk bisa membuka Kartu Tani tersebut. Untuk itu, Aria meminta Menteri Pertanian sebagai regulator mencermati permasalahan ini, mengingat PT Pupuk Indonesia hanya sebagai operator.

Aria juga menyampaikan pentingnya ketersediaan pupuk di gudang yang siap untuk *displacement* ke distributor bahkan ke pengecer. Gudang pupuk juga harus menjamin ketersediaan pupuk dari titik lini I ke lini II, sehingga pupuk Urea, NPK (Phonska), ZA n SP-39



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima memimpin peninjauan ke Gudang PT Pupuk Indonesia. Foto: Kresno/jk

selalu tersedia dengan terjadwal sesuai dengan masa tanam petani.

“Persoalan sekarang bagaimana masalah pergudangan ini menjadi hal yang penting, tadi pak Wakil Direktur juga menyampaikan kalau penyebaran jumlahnya mencukupi tapi mekanisme gudang harus diperbaiki supaya ketersediaan pupuk itu tepat waktu. Karena kalau sudah bergeser 1-2 minggu, yang seharusnya urea, phonska, ZA atau SP-36 ada tetapi malah tidak ada, itu jadi tidak terlalu bermanfaat bagi petani itu sendiri,” imbuh Aria.

Pada kesempatan itu, Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Nugraha Christijanto mengakui ada beberapa

kendala mengenai ketersediaan pupuk. Ia menegaskan komitmen PT Pupuk Indonesia untuk senantiasa memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani sesuai dengan yang telah ditugaskan.

“Faktor yang menyebabkan kelangkaan ini cukup banyak, dan harus diselesaikan secara holistik. Pupuk Indonesia tetap berkomitmen untuk bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang ditugaskan. Seperti tadi kami paparkan, secara jumlah itu cukup sampai dengan hari ini. Mungkin di beberapa daerah itu kami belum bisa salurkan karena keterbatasan aturan. Ada yang masih belum terbit SK dinasny sehingga kami tidak bisa menyalurkan,” ujar Nugraha. ■ eno/es

Kesiapan Logistik Jadi Tantangan Dalam Program Vaksinasi Nasional

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menilai kesiapan logistik menjadi tantangan dalam program vaksinasi nasional tahap pertama yang sudah mulai berjalan. Untuk itu, pihaknya memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki standar yang baik, mulai dari ruang penyimpanan, infrastruktur pendingin, hingga sarana transportasi guna proses pendistribusian vaksin Covid-19.

Hal itu disampaikan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI meninjau salah satu tempat penyimpanan vaksin Jawa Barat di Gudang Bizpark Kopo, Bandung, Jabar, Jumat (22/1). Menurutnya persiapan Pemprov Jabar dalam mengurus sarana penunjang

vaksin juga skema pendistribusian patut diapresiasi dan terus dikawal.

“Persiapan sarana penunjang untuk vaksinasi ini saya kira penting sekali ya. Kalau masalah pendistribusian dan penyimpanan secara umum saya lihat sudah baik. Hanya sedikit ya, memang penyimpanan vaksin di dua titik di Jawa Barat perlu terus dikawal betul jangan sampai lalai keluar dari standarnya, karena bisa merusak kualitas vaksin,” terang politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Jabar diketahui memiliki dua lokasi tempat penyimpanan vaksin di daerah Bandung, yakni Pasteur dan Kopo. Tempat penyimpanan tersebut memiliki pengaturan suhu yang bisa diatur berkisar 2-8 derajat celcius serta pengontrolan suhu yang dilakukan tiga kali sehari. Felly pun turut mengapresiasi skema-

skema penjagaan kualitas vaksin tersebut.

Selain itu, hal lainnya yang menjadi penting dan patut digencarkan menurut Felly adalah program sosialisasi vaksin. Menurutnya, pemerintah harus dapat mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat memercayai vaksin sebagai satu solusi dan komitmen negara dalam upaya pemberantasan virus Covid-19.

“Pemerintah tidak boleh lesu dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya program vaksinasi ini mengatasi penyebaran virus Covid. Vaksin harus bisa dipercaya sebagai peningkat kekebalan imunitas atau *herd immunity*. Selain itu juga pastikan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman, berkhasiat, dan minim efek samping. Dengan itu kepercayaan masyarakat terjaga,” tutup legislator dari Sulawesi Utara itu. ■ er/sf



Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene meninjau penyimpanan vaksin di Gudang Bizpark Kopo, Jabar. Foto: Erlangga/jk

Vaksin Merah Putih Diproduksi 2022

Vaksin Merah Putih produk dalam negeri baru bisa diproduksi secara massal tahun 2022. Vaksin antivirus corona ini diproduksi oleh PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat. Saat ini, Bio Farma sedang memproduksi bahan baku vaksin impor dari beberapa negara. 15 juta dosis vaksin sudah tiba di Bio Farma dan 1,32 juta sudah terdistribusi ke seluruh provinsi.

Demikian mengemuka saat Tim Kunspek Komisi IX DPR RI menggelar pertemuan dengan Direktur Utama PT. Bio Farma Honesti Basyir di Bandung, Jumat (22/1). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh ingin mengetahui progres produksi vaksin Merah Putih yang ditunggu-tunggu publik. Menurutnya, saat ini Bio Farma sedang sibuk memproduksi sekaligus

mendistribusikan vaksin Sinovac asal China.

“Selain itu kami juga ingin mendapatkan progres dari upaya kita mendapatkan pasokan dari vaksin lain selain Sinovac, termasuk progres pengembangan vaksin Merah Putih. Komisi IX DPR RI sangat berharap bahwa seluruh upaya kita mengatasi pandemi melalui vaksinasi berjalan lancar sesuai rencana,” ucap Ninik, sapaan akrabnya.

Ninik menambahkan, pertemuan ini merupakan kelanjutan rapat dengan Bio Farma, Menteri Kesehatan, dan Kepala BPOM di DPR beberapa waktu lalu yang membahas program vaksinasi. Dijelaskan

Dirut Bio Farma, hingga Juni 2021 nanti, Bio Farma akan menerima 144.700.000 dosis vaksin.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Nihayatul Wafiroh. Foto: Husen/jk



”

SUDAH HAMPIR 10 BULAN KITA BERJIBAKU MENGHADAPI PANDEMI YANG MENGHARUSKAN KITA SEMUA MERUBAH CARA HIDUP DAN BERADAPTASI. ADANYA VAKSIN TENTU MERUPAKAN SALAH SATU HARAPAN KITA SEMUA AGAR PANDEMI SEGERA BERAKHIR. KITA PATUT BERSYUKUR MENDAPATKAN AKSES KE BEBERAPA VAKSIN COVID-19 YANG PROSES KERJA SAMANYA MELALUI PT BIO FARMA

Vaksin produksi Inggris dan Amerika Serikat juga sudah berdatangan.

“Sudah hampir 10 bulan kita berjibaku menghadapi pandemi yang mengharuskan kita semua merubah cara hidup dan beradaptasi. Adanya vaksin tentu merupakan salah satu harapan kita semua agar pandemi segera berakhir. Kita patut bersyukur mendapatkan akses ke beberapa vaksin Covid-19 yang proses kerja samanya melalui PT Bio Farma. Program ini sangat penting, karena dibiayai APBN dan masyarakat terjamin aksesnya,” imbuh Ninik. ■ mh/es

Komisi IX Pantau Persiapan Pelaksanaan Vaksinasi di Pandeglang

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menyampaikan, salah satu upaya yang dilakukan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia adalah dengan melakukan vaksinasi. Diketahui Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, akan melaksanakan vaksinasi pada tahap pertama termin kedua, yakni pada Februari 2021.

Ansory menambahkan, guna mengetahui persiapan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Pandeglang tersebut, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ingin menggali informasi mengenai sudah sejauh mana persiapan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pandeglang beserta *stakeholder* lainnya.

“Komisi IX DPR RI melakukan pengawasan terhadap persiapan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Pandeglang, dengan tujuan untuk menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan tentang akses vaksin Covid-19 dan juga pelaksanaan vaksinasi yang akan dilakukan di Kabupaten Pandeglang,” ucap Ansory di sela-sela kunjungan ke Pandeglang, Banten, Jumat (22/1).

Selain itu, sambung politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut, Komisi IX DPR RI juga ingin melakukan analisa tentang kebijakan yang telah dan akan ditempuh pemerintah Kabupaten Pandeglang, baik dalam masa persiapan maupun dalam tahap pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

“Kami ingin memperoleh masukan, apakah terdapat permasalahan dalam masa persiapan dan pelaksanaan koordinasi Covid-19 ini, serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan ketentuan yang diambil pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pandeglang,” tutur Ansory.

Ia menyatakan, Komisi IX DPR RI juga akan menyusun rekomendasi yang dapat ditujukan kepada semua pihak agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pandeglang dapat dilakukan dengan baik dan lancar.

“Memang masih ditemukan beberapa kendala dalam persiapannya, seperti masalah sarana dan prasarana pendukung maupun tenaga kesehatan. Kami telah meminta kepada Menteri Kesehatan untuk melakukan relaksasi atau kemudahan-kemudahan terkait masalah tenaga kesehatan ini. Dengan adanya relaksasi dan kemudahan-kemudahan tersebut, maka segala kekurangan yang ada bisa kita relaksasikan secara signifikan,” ujarnya. Ansory menilai, sejauh ini persiapan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Pandeglang sudah cukup baik.

Sementara itu, Dinas Kesehatan



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar Foto: Dep/jk

Kabupaten Pandeglang memaparkan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan vaksinasi di wilayah Kabupaten Pandeglang, di antaranya yaitu melakukan pendataan fasilitas pelayanan kesehatan, registrasi dan verifikasi sasaran, melakukan perhitungan kebutuhan kulkas tempat penyimpanan vaksin, serta menginventarisasi sarana dengan menggunakan sistem *online*.

Saat ini di Kabupaten Pandeglang baru Bupati Pandeglang yang sudah divaksin. Hal ini ditujukan untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat bahwa vaksin yang diberikan tersebut aman. ■ dep/sf

Angka Literasi Banten Perlu Ditingkatkan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan, angka literasi di Provinsi Banten termasuk yang agak rendah, begitupun pada minat bacanya.

Terutama pada beberapa daerah-daerah kabupaten yang mengatakan baru 5-6 tahun berkembang secara ekonomi maupun infrastruktur. Tentu hal tersebut seiring dengan berkembangnya pendidikan dan minat baca masyarakat.

Saat memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI mengunjungi Perpustakaan Daerah di Kota Serang, Banten, Jumat (22/1), Dede menilai, untuk tingkat provinsi, perpustakaan yang ada di Banten sudah memadai dan koleksi buku sudah cukup lengkap, bahkan disediakan juga pojok khusus Syekh Nawawi al-Bantani.

“Tetapi kita melihat distribusi atau penyebaran literasi kepada beberapa kabupaten belum seiring sejalan dengan provinsi. Apakah memang disebabkan karena distribusi buku perpustakaan yang ada di beberapa kabupaten atau kurangnya perpustakaan

sekolah yang ada di desa. Saya menduga memang saat ini Banten sedang berusaha untuk mengejar ketertinggalan melalui pengembangan infrastruktur,” ujar Dede.

Menurut politisi Fraksi Partai Demokrat ini, memang disparitas perpustakaan pada level kota besar dan kabupaten itu pasti terjadi, apalagi jika bicara dari sisi bangunan. Sedangkan dari sisi marketnya, Perpustakaan mesti di bedakan antara market desa dengan kota. Tetapi di sini harus juga melihat marketnya, mesti dibedakan *market* antara desa dan kota. Karena memang secara infrastruktur dan pendidikan sudah terjadi disparitas.

“Kalau kita berbicara di desa atau di kabupaten, maka yang diperlukan masyarakat adalah buku-buku petunjuk tentang bertani, beternak dan pengembangan UMKM. Sedangkan jika yang tersedia cuma buku pelajaran mungkin buat anak-anak tidak menarik, mungkin mereka diawali dengan buku komik,” ungkapnya.

Politisi dapil Jawa Barat II ini menekankan, yang terpenting adalah

bagaimana mengangkat angka literasi masyarakat dahulu. “Tapi kalau langsung masuk ke sebuah desa tertinggal dengan memberikan buku bacaan tentang statistik, *yah* mereka belum tentu mau baca,” terangnya.

Dede berharap, Perpustakaan Nasional sebagai penggawang perpustakaan di daerah dan Kemendikbud untuk perpustakaan sekolah, jangan hanya diisi buku-buku pelajaran, Kominfo juga harus mulai untuk melakukan digitalisasi buku. Karena perpustakaan harus dibuat semenarik mungkin agar masyarakat bisa nyaman membaca.

“Saya belum lihat nuansa perpustakaan yang ada *coffe shop*-nya atau nuansa lain yang bisa buat orang nyaman duduk membaca. Sehingga orang datang ke tempat buku itu membuat orang ingin membaca. Jadi memang banyak faktor dan cara untuk meningkatkan minat baca. Ini perlu kerja sama dengan lintas kementerian, karena saya tahu anggaran Perpustakaan Nasional ini tidak besar,” jelasnya. ■ jk/es



Tim Kunspek Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meninjau Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Foto: Jaka/jk

Komisi X Pastikan Kota Cirebon Dapatkan Pojok Baca Digital Tahun 2021



Tim Kunspek Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyalurkan Pojok Baca Digital kepada Pemkot Cirebon. Foto: Eno/jk

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memastikan Kota Cirebon,

Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2021 ini akan mendapatkan Pojok Baca Digital dan per tanggal 22 Januari 2021 koleksi bukunya juga sudah ditambah sebanyak 500 judul buku. Menurutnya hal ini menjadi dukungan transformasi dari buku konvensional ke *paperless* atau *e-book* yang saat ini sedang berlangsung di Kota Cirebon.

“Mereka sudah berusaha juga, sudah dicek lewat aplikasi Krisna dan Kota Cirebon termasuk yang nanti akan dapat Pojok Baca Digital, sehingga Kunspek (Kunjungan Kerja Spesifik) kali ini sangat bermanfaat,” ungkap Fikri saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan jajaran Pemerintah Kota Cirebon, di Kantor Wali Kota Cirebon, Jawa Barat, Jumat (22/1).

Dalam pertemuan itu turut terungkap hasil survei Perpustakaan Nasional terhadap tingkat literasi masyarakat Kota Cirebon yang belum menggembirakan, yaitu masih di angka 53 persen. Menurut politisi PKS itu, untuk mendongkrak literasi tingkat nasional agar tidak semakin terpuruk, literasi di tingkat kota/kabupaten juga harus naik. Namun di saat pandemi seperti saat ini, muncul kendala untuk mendatangi perpustakaan, sehingga banyak masyarakat yang sudah beralih ke internet, digital, internet, *e-book* dan seterusnya.

“Ternyata sudah direspon oleh pegiat literasi di (Cirebon) sini, luar biasa, bahkan ada ikon seperti Kapten Literasi dan sebagainya yang dapat membangkitkan kegemaran membaca, keluhan mereka kita dengar dan kebetulan inilah fungsinya Kunjungan Spesifik seperti sekarang

ini, menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah ada problematika apa, *bottleneck* apa, apakah program bisa jalan atau tidak, dan ternyata di sini klop, yang dibutuhkan di sini adalah Pojok Baca Digital, dan ternyata ada skema itu,” ujar Fikri.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati kepada Tim Kunspek Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa perpustakaan tetaplah elemen terpenting dalam upaya mendukung penyediaan sumber informasi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Eti Herawati menjelaskan peran penting dari perpustakaan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas SDM, juga mensyaratkan adanya pengelolaan perpustakaan umum kota, kelurahan, perpustakaan umum komunitas, dan perpustakaan masyarakat yang profesional. ■ eno/sf

Komisi X Evaluasi Pelayanan Perpustakaan Indramayu di Masa Pandemi

Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 dengan capaian ekonomi modern dan tingkat kesejahteraan berkualitas, dituntut adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, produktif, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Perpustakaan memiliki peran penting sebagai pendukung pembangunan manusia berkualitas dan berdaya saing, serta mendukung pilar dan pondasi yang memperkokoh kualitas SDM. Untuk itu, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau dan mengevaluasi pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, khususnya di masa pandemi Covid-19 ini.

“Saya inginkan di masa pandemi, Perpustakaan Nasional dan jajarannya di provinsi dan daerah tidak terjadi penurunan yang sangat drastis terhadap pelayanan publik untuk masyarakat,” kata Anggota Komisi X DPR RI Ferdiyansyah saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Woro Titi Haryati, Asisten Daerah III Kabupaten Indramayu Suwenda Asmita, Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dadang Rusdiyanto, Kepala Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca Ateng Kusnandar Adi Saputra, perwakilan pemustaka Indramayu, di Pendopo Kantor Bupati Indramayu, Jawa Barat, Jumat (22/1).

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, saat pertemuan tersebut muncul ide-ide segar serta pemikiran yang sangat baik untuk keberlangsungan masyarakat dalam



Tim Kunspek Komisi X DPR RI dipimpin Anggota DPR RI Ferdiyansyah meninjau pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Foto: Runi/jk

mendapatkan informasi terhadap bahan bacaan melalui Perpustakaan Umum Indramayu yang sudah bisa dilakukan dengan sistem *Drive Thru online* maupun digital. Selain itu turut dibahas mengenai keinginan masyarakat terhadap adanya literasi inklusi sosial. Hal tersebut untuk menjawab keresahan dan kekhawatiran masyarakat saat situasi pandemi Covid-19 saat ini.

“Saya rasa program literasi inklusi sosial ini sangat penting untuk masyarakat dalam kondisi saat ini, yang nantinya dengan program ini bertujuan memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga kemampuan literasi meningkat yang berujung peningkatan kreativitas masyarakat dan kesempatan akses informasi. Berkaitan dengan program-program yang disampaikan dalam pertemuan perlu diadakan rutinitas yang akan dikemas menjadi suatu kebutuhan tiap tahunnya, yakni pertemuan terhadap semua pemangku kepentingan daerah,” papar Ferdi.

Ferdi menambahkan, program-program peningkatan literasi ini harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan daerah, misalnya kerja sama antar dinas sehingga tercipta dengan koordinasi yang baik untuk mendapatkan program dan hasil yang diinginkan. Masih dalam kaitan yang sama, ia melihat kearifan lokal berdasarkan budaya dan situasi daerah di Indonesia, yang bisa dituangkan dalam tulisan, sehingga diharapkan budaya lokal bisa terangkat.

“Alhamdulillah dari hasil pertemuan, Komisi X DPR RI dengan jajaran di bidang perpustakaan menghasilkan pertemuan yang inovatif, kreatif, yang bisa dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional. Dan tentu Insya Allah ada hal yang menjadi jawaban terkait UU Perpustakaan, yakni UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, UU Sistem Perbukuan, dan UU Sistem Pemajuan Kebudayaan yang memang belum terjawab dari tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional,” pungkas legislator dapil Jawa Barat XI itu. ■ rni/sf

PIP Perlu Tingkatkan Kuota Penerima Pinjaman UMi

Anggota Komisi XI DPR RI Ela Siti Nuryamah menyampaikan sejumlah catatan kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP), sebagai badan layanan umum yang bertugas sebagai badan pengelola dana Ultra Mikro (UMi). Menurutnya, kuota penerima pinjaman perlu lebih ditingkatkan. Terlebih bagi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang turut berperan penting dalam perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

“Saat ini pinjaman Ultra Mikro lebih banyak diberikan kepada sektor perdagangan, misalnya kepada pedagang eceran, jumlahnya hampir 95 persen. Saya hanya ingin beri masukan, karena saat pandemi yang paling bertahan itu sektor pangan, maka petani juga harus diprioritaskan. Sementara sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan proporsinya masih 3 persen, ini perlu ditingkatkan lagi kuotanya agar bisa lebih banyak lagi yang mengakses pembiayaan dari PIP,” kata Ela saat RDP dengan jajaran PIP, Selasa (26/1).

Akses permodalan dan pendampingan, juga turut disoroti Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu. Sebelumnya, Direktur Utama PIP Ririn Kadariyah sempat menjelaskan bahwa semua pihak bisa mengakses pinjaman sektor mikro yang berkisar antara Rp2 juta hingga Rp10 juta tersebut. Namun, Ela mengatakan masih banyak masyarakat di daerah pemilihannya yang masih kesulitan untuk mengakses pinjaman.

“Walaupun penyalurannya melalui Pegadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM) atau Bahana Artha Ventura (BAV), tetapi dapil saya justru



Anggota Komisi XI DPR Ela Siti Nuryamah. Foto: Arief/jk

sulit yang mengakses. Saran saya, sebaiknya dibuat pendampingan-pendampingan yang terjun langsung ke masyarakat dan komunitas-komunitas usaha kecil yang berisikan 20-30 orang. Ini lebih menarik dan lebih jelas, sederhana dan tepat sasaran manfaatnya. Sekarang ini PIP malah lebih bisa diakses di perkotaan,” ungkapnya.

Permasalahan data penerima juga tak luput dari sorotannya. Ela mengungkap bahwa pelaku UMKM yang menerima bantuan langsung tunai (BLT BPUM), atau bantuan presiden sebesar Rp2,4 juta, merupakan pelaku usaha yang terdaftar di lembaga-lembaga pembiayaan saja. Hal ini yang ditengarai menjadi penyebab tidak

meratanya bantuan tunai bagi pelaku usaha tersebut, terlebih bagi pelaku usaha mikro yang tidak pernah terdaftar di lembaga pembiayaan manapun.

“Dari jumlah 468 ribu yang mengajukan, yang disetujui hanya 85 ribu saja, sisanya tidak lolos karena tidak pernah terdaftar sebelumnya, padahal ini kan soal bagaimana bantuan bisa tepat sasaran. Jadi yang penerima itu-itu saja. Penerima yang bisa mengakses, hanya mereka yang punya sejarah pinjaman terhadap lembaga pembiayaan. Masyarakat kecil yang belum terdaftar tidak terdata dan tidak dibantu, akhirnya juga tidak mendapat BLT,” tandasnya.

■ atw/sf

Willy Aditya: Tingkatkan Produksi Pangan Secara Mandiri



Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya bertukar cenderamata dengan Gubernur Jabar Mochamad Ridwan Kamil. Foto: Eko/jk

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya memimpin kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat guna membedah dan mendiskusikan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keduanya sepakat ketersediaan pangan dalam negeri harus selalu tercukupi dan aman. Willy pun menekankan agar semua pihak bahu membahu meningkatkan produksi pangan dalam negeri secara mandiri.

“Undang-Undang Pangan merupakan salah satu aturan yang penting dan strategis, hal ini tergambar dari tujuan undang-undang ini dibentuk yakni untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka

ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat,” papar Willy di Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Senin (25/1).

Dia juga mengungkapkan, keberadaan UU tentang Pangan berguna untuk mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, juga untuk mempermudah an meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat.

“Tujuan penting lainnya juga meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan dan melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional,” tandas politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Willy juga menjelaskan, sesuai dengan kewenangan dalam melakukan pemantuan dan peninjauan undang-undang, Baleg telah mengagendakan kegiatan pemantauan dan peninjauan meliputi Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum secara daring yang dilaksanakan sejak April 2020 di ruang rapat Baleg DPR RI dan pada masa sidang ini dilakukan kegiatan kunjungan kerja yang dilaksanakan di tiga provinsi, yaitu Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah. ■ eko/es



Wakil Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera (tengah) saat memimpin Tim Kunjungan Kerja BKSAP ke Sulsel. Foto: Punthofj

'BKSAP Day' Jembatani Potensi Sulsel dengan Dunia Internasional

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan perhelatan 'BKSAP Day' bertujuan meningkatkan sinergi kolaborasi dalam menyerap aspirasi dari pemerintah daerah hingga akademisi tak terkecuali di Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menambahkan, BKSAP juga melakukan pemetaan potensi daerah seperti UMKM dan dikaitkan dengan peluang diplomasi parlemen.

Hal ini disampaikan Mardani usai memimpin Tim Kunjungan Kerja BKSAP ke Sulawesi Selatan dalam rangka penyelenggaraan BKSAP Day dengan Tema: Diplomasi DPR RI dan Potensi Sulsel: Sinergi dan Kolaborasi, di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat (22/1). Turut hadir, Anggota BKSAP DPR RI Jazuli Juwaini dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani.

"Dalam diplomasi parlemen kami BKSAP DPR RI mengenal lebih dalam

potensi kekuatan fakta data dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian, untuk selanjutnya menjadi jembatan komunikasi diplomasi sinergi kolaborasi Indonesia dengan pihak luar yaitu dunia internasional," ujar Mardani.

Politikus Fraksi PKS tersebut mengapresiasi berbagai masukan sebagai *inside* dan *inspiration* dari pihak Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar. Salah satunya, usulan mengenai potensi UMKM di Provinsi Sulsel yang bisa diperkenalkan dan dipasarkan di dunia internasional.

UMKM di Sulsel bisa menjadi potensi yang memberikan benefit kesejahteraan bagi masyarakat. "Tentu, ini berkaitan pemasaran bagaimana produk dan hasil dari potensi Sulsel untuk diperkenalkan di dunia internasional. BKSAP DPR RI siap membantu dalam diplomasi parlemen internasional," ucap Mardani berkomitmen.

Mardani juga mengapresiasi usulan dan aspirasi dari Dekan Universitas

Hasanuddin Prof. Dr. Armin mengenai '*one village one product*'. Di mana, masing-masing produk unggulan daerah bisa di-*branding* dan dijual ke dunia internasional untuk menunjukkan betapa kayanya perdagangan internasional Indonesia.

Ia mencontohkan, BKSAP DPR RI mengadakan pertemuan dengan Wamenlu Mahendra Siregar. Pertemuan tersebut mengundang organisasi pariwisata internasional sebagai upaya membantu meningkatkan kualitas pariwisata Bali.

"Bukan hanya *branding* tetapi juga produk dan kualitas dari pariwisatanya yang ditawarkan. Bukan hanya pariwisata massal tapi pariwisata butik yang justru akan mendatangkan kesejahteraan yang lebih besar lagi bagi masyarakat Bali. *Benchmark* Bali tersebut yang akan kita bawa itu untuk Sulsel dan daerah-daerah lain yang akan kami elaborasi dengan Kemenlu," pungkas Mardani. ■ pun/es

Alokasi Sasaran Penerima Subsidi Energi Perlu Dibenahi

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI I Gusti

Agung Rai Wirajaya mengatakan kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Namun pada prakteknya, terjadi anomali dan disorientasi sasaran pada kebijakan subsidi di Indonesia yang manfaatnya jatuh pada kelompok yang tidak semestinya.

“Ketimpangan dalam pengalokasian sasaran penerima subsidi energi yang terus berulang merupakan permasalahan yang harus diselesaikan. Maka dari itu kami (BAKN) terus melakukan pengawasan serta meminta masukan dari pemerintah daerah, badan usaha maupun kelompok masyarakat untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan subsidi di Indonesia,” ungkapnya usai memimpin pertemuan BAKN dengan jajaran Pemerintah Kota Cilegon, Banten, Senin (25/1).

Pasalnya, lanjut Agung Rai, subsidi energi di Indonesia dalam satu dekade terakhir mencapai angka lebih dari Rp100 triliun setiap tahunnya. Dalam postur sementara APBN tahun 2021, subsidi energi dialokasikan Rp110.512,2 miliar, terdiri subsidi jenis BBM tertentu dan elpiji tabung 3 kg sebesar Rp56.924,9 miliar dan subsidi listrik sebesar Rp53.587,3 miliar.

“Anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan elpiji tabung 3 kg dalam APBN tahun 2021 yang sebesar Rp 56.924,9 miliar lebih tinggi sebesar Rp 15.812 miliar jika dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2020 yang sebesar Rp 41.112 miliar,” ungkap politikus dari Bali itu.



Wakil Ketua BAKN DPR I Gusti Agung Rai Wirajaya. Foto: Ria/jk

”

KETIMPANGAN DALAM PENGALOKASIAN SASARAN PENERIMA SUBSIDI ENERGI YANG TERUS BERULANG MERUPAKAN PERMASALAHAN YANG HARUS DISELESAIKAN.

Dalam konteks besarnya angka subsidi, ia memaparkan, selama bertahun-tahun, subsidi energi menjadi salah satu beban fiskal yang signifikan. Rata-rata pengeluaran terkait subsidi konsumen saja sudah mencapai sekitar 3,1 persen dari *produk domestik bruto* (PDB) tahunan per tahun fiskal. Biaya ini menyebabkan ketidakstabilan makro ekonomi dan cenderung membebani belanja pembangunan.

Agar kebijakan subsidi energi tepat sasaran dan tidak membebani APBN,

skema pemberian subsidi energi perlu dievaluasi. “Skema pemberian subsidi energi perlu diperbaiki, guna memastikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial perlu ada “ jelasnya.

Di Kota Cilegon sendiri, politisi PDI-Perjuangan itu melihat penyaluran subsidi berjalan cukup baik, pemerintah daerah mengaku pendataan terhadap masyarakat penerima subsidi berdasarkan *by name by address*, sehingga kebijakan subsidi dirasakan langsung oleh masyarakat yang mendapatkannya.

“Pada tataran distribusi, mereka mengawasi harga di lapangan agar tidak boleh melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi). Namun sayangnya, mekanisme pengawasan hanya sampai di mata rantai pengecer tidak pada konsumen, sehingga masih banyak yang menjual melebihi HET,” terangnya. ■ rmm/es

BURT DPR Apresiasi Penanganan Pasien Jamkestama di RS Bayukarta Karawang

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah mengapresiasi Rumah Sakit (RS) Bayukarta, Karawang, Jawa Barat atas pelayanan dan penanganan terhadap pasien program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama). RS Bayukarta ini merupakan salah satu RS *provider* yang ditunjuk oleh PT Jasindo dalam melaksanakan program jamkestama bagi pejabat negara termasuk Anggota DPR RI beserta keluarga.

“Tadi sempat dijelaskan bahwa RS ini memiliki 12 ruang VIP, berbagai peralatan yang cukup canggih, serta tenaga medis termasuk para dokter ahli atau spesialis yang cukup banyak. Dengan begitu saya menilai RS Bayukarta ini akan siap memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta Jamkestama yang di dalamnya termasuk para anggota DPR RI, serta juga pasien umum lainnya. Saya sangat mengapresiasi,” jelas Dimiyati usai pertemuan dengan jajaran direksi RS Bayukarta, di Karawang, Jawa Barat, Selasa (26/1).

Dalam pertemuan tersebut, politisi Fraksi PKS ini juga mempertanyakan penanganan pasien Covid-19 dan *non-Covid*, karena akan sangat berbahaya jika penanganannya dijadikan satu. Dari penjelasan pihak RS Bayukarta, Dimiyati menyampaikan, RS ini memiliki 45 tempat tidur isolasi Covid-19 yang tentu tidak tercampur dengan pasien

non-Covid. Pemisahan pasien Covid dan *non-Covid* ini dilakukan sejak pasien datang ke RS tersebut.

“Artinya sejak masuk pasien yang terindikasi Covid dan *non-Covid* penanganannya sudah berbeda, dipisahkan gedung, ruangnya dan tentu saja peralatannya. Sehingga benar-benar terpisah. Dengan begitu kami menjadi tenang jika nanti ada anggota atau keluarganya yang tiba-tiba sakit di daerah tersebut. Ini juga menandakan rumah sakit di daerah sudah *grow up* dan pemilihan RS Bayukarta oleh PT Jasindo ini menurut saya sudah sangat tepat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dimiyati juga didampingi Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso (F-Demokrat), dan Anggota BURT DPR RI Ribka Tjiptaning, Paramitha Widya Kusuma (F-PDI Perjuangan), Tina Nur Alam (F-NasDem), Ali Zamroni (F-Gerindra), Lasmi Indaryani (F-Demokrat), Hamid Noor Yasin (F-PKS), serta Slamet Ariyadi (F-PAN). ■ *ayu/es*

”

ARTINYA SEJAK MASUK PASIEN YANG TERINDIKASI COVID DAN NON-COVID PENANGANANNYA SUDAH BERBEDA, DIPISAHKAN GEDUNG, RUANGANNYA DAN TENTU SAJA PERALATANNYA. SEHINGGA BENAR-BENAR TERPISAH

Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah. Foto: Ayu/jk



Standar Pelayanan RS Siloam Purwakarta Representatif Untuk Peserta Jamkestama



Wakil Ketua BURT DPR RI Bakri didampingi Pimpinan dan Anggota BURT DPR RI bertukar cenderamata dengan jajaran Direksi RS Siloam Purwakarta. Foto: Ria/jk

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Bakri memastikan pelayanan Rumah Sakit (RS) Siloam Purwakarta, Jawa Barat, sebagai rumah sakit *provider* PT Jasindo sudah representatif dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.

“RS Siloam cukup representatif untuk memberikan pelayanan terhadap Anggota DPR serta keluarganya. Setelah mendengar paparan yang disampaikan pihak rumah sakit, saya menilai RS Siloam ini sudah memenuhi standar pelayanan kesehatan mulai dari fasilitas, pelayanan, pengobatan hingga penanganan,” katanya usai memimpin pertemuan Tim Kunker BURT DPR RI dengan Direksi RS

Siloam Purwakarta, Jumat (22/1).

Bakri juga memberikan apresiasi terhadap fasilitas dan pelayanan yang diberikan RS Siloam Purwakarta terhadap pasien yang terpapar Covid-19 dan *non-Covid-19*. “Kami apresiasi prosedur penanganan pasien Covid dan non-Covid yang diterapkan Siloam ini, mulai dari pemisahan ruang *emergency*, pelaksanaan *screening*, pemisahan ruang perawatan serta kelengkapan alat kesehatan,” jelasnya.

Legislator Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu berharap, sebagai RS *provider* PT Jasindo dalam menjalankan program Jamkestama, RS Siloam Purwakarta dapat meningkatkan pelayanan kepada Anggota Dewan dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat.

Senada, Wakil Ketua BURT DPR RI Evita Nursanty menilai pelayanan

yang disediakan RS Siloam Purwakarta terhadap Anggota DPR beserta keluarga sudah sangat baik. Bahkan menurutnya standar pelayanan RS Siloam patut dijadikan contoh RS lain yang menjadi *provider* Jasindo.

“Kami melihat di semua RS Siloam fasilitasnya sudah sangat baik, bahkan yang di kabupaten sekalipun. Menurut kami standar pelayanan RS Siloam Purwakarta harus dijadikan acuan terlebih dalam penanganan pandemi Covid-19,” kata politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan.

Kunjungan BURT DPR RI ke RS Siloam Purwakarta juga turut diikuti sejumlah Anggota BURT DPR RI lain di antaranya Ribka Tjiptaning (PDI-Perjuangan/ Jawa Barat IV), Indah Kurniawati (PDI-Perjuangan/ Jawa Timur I), Hamid Noor Yasin (PKS/ Jawa Tengah IV), dan Slamet Ariyadi (PAN/ Jawa Timur XI). ■ rnm/sf



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung didampingi Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI saat konferensi pers terkait *fit and proper test* terhadap 18 calon Anggota Ombudsman RI periode 2021 - 2022, di Selasar Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2021) Foto : Andri/Man



Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rahmat Gobel foto bersama usai melantik Anggota DPR RI Anggi Erma Rini sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Foto : Arief/Man



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menyampaikan surat persetujuan terhadap Calon Kapolri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara, dengan nomor Surat PW/00958/DPR RI/1/2021 di Kemensesneg, Jakarta, Jumat (22/1/2021). Foto : Ist/Man